

**BAB III**  
**PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA (1989-2001)**

Perkembangan Perpustakaan Nasional RI sejak perubahan status kelembagaan, mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari segi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka serta peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, terdapat perkembangan lain yang terkait dengan perubahan struktur kelembagaan dan juga wewenang Perpustakaan Nasional RI terhadap Perpustakaan Nasional di tingkat Propinsi. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

**A. Perkembangan Perpustakaan Nasional**

Di Indonesia, tugas Perpustakaan Nasional berbeda dengan perpustakaan di negara lain. Perpustakaan Nasional RI memiliki tugas pokok sebagai pengembang dan pembina berbagai perpustakaan yang ada. Hal yang mendasari tugas pokok ini adalah kondisi rakyat Indonesia yang cenderung masih kurang apresiasi dalam membaca (minat baca kurang). Jika di negara lain, keberadaan perpustakaan menjadi kebutuhan penting sehingga orang dengan sadar mengunjungi perpustakaan. Akan tetapi di Indonesia, perpustakaan merupakan tempat yang tidak populer dan cenderung dihindari. Berawal dari kondisi itulah maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan minat baca rakyat Indonesia sebagai modal peningkatan kualitas rakyat dengan mengamanatkan kepada

Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan dan membina berbagai jenis perpustakaan yang ada<sup>1</sup>.

Pengembangan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pengembangan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara berkesinambungan. Dalam hal pengembangan, sasaran yang dikembangkan tidak berbeda dengan sasaran di bidang pembinaan. Perpustakaan Nasional RI melakukan kegiatan pengembangan dalam hal penambahan unit perpustakaan di tingkat daerah, penambahan sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional perpustakaan (mobil perpustakaan keliling, alat atau mesin perawatan bahan pustaka) dan pengembangan dalam hal sumber daya manusia (pustakawan) serta pemutakhiran sistem perpustakaan (komputerisasi) yang berskala nasional. Penting diketahui bahwa kemajuan ataupun perkembangan yang telah dicapai tidak diimbangi dengan sistem pencatatan atau pengarsipan yang rapih, sehingga data yang diperoleh bersifat data akhir ketika program inventarisasi dan bukan data per tahun yang menunjukkan perkembangan tiap tahun. Seperti data jumlah perpustakaan di Indonesia di bawah ini, merupakan data yang diperoleh dari adanya pengkajian mengenai persepsi pemakai pada tahun 2001. Berikut adalah data jumlah perpustakaan di Indonesia hingga tahun 2000 :

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs. Supriyanto, tanggal 1 September 2008, di Jakarta

Tabel III.1

Data Jumlah Perpustakaan di Indonesia Hingga tahun 2000<sup>2</sup>

No.	Propinsi	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Perpustakaan Umum	Perpustakaan Khusus
1	Nanggroe Aceh Darussalam	12	282	415	40
2	Sumatera Utara	566	30	51	17
3	Sumatera Barat	648	113	350	42
4	Sumatera Selatan	1768	106	311	22
5	Bengkulu	274	10	46	50
6	Jambi	110	0	7	1
7	Lampung	661	16	87	64
8	Riau	376	6	130	7
9	Jawa Barat	1811	52	547	118
10	Jawa Tengah	2134	34	655	42
11	Jawa Timur	213	34	369	17
12	D.I Yogyakarta	473	84	101	59
13	Bali	260	5	69	85
14	Nusa Tenggara Barat	257	15	321	52
15	Nusa Tenggara Timur	187	10	330	27
16	Kalimantan Selatan	26	35	114	251
17	Kalimantan Tengah	160	6	54	63
18	Kalimantan Timur	1098	27	18	157
19	Kalimantan Barat	225	7	8	47
20	Sulawesi Selatan	1022	49	310	27
21	Sulawesi Tengah	864	10	354	37
22	Sulawesi Tenggara	800	10	354	37
23	Sulawesi Utara	117	15	315	20
24	Sulawesi Barat	648	113	350	42
25	Maluku	132	7	312	17
26	Papua	70	14	5	17

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kajian Persepsi Pemakai Terhadap Perpustakaan Nasional RI*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2001) hal 8.

## **B. Perkembangan Pembinaan Perpustakaan**

Istilah pembinaan diartikan dengan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>3</sup>. Oleh karena itu, dalam pembinaan tentu ada yang membina dan yang dibina, yang membina tentu lebih baik dari yang dibina. Maka Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina mau tidak mau, suka tidak suka, harus lebih baik dari perpustakaan lain yang dibina.

Secara garis besar kondisi perpustakaan di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yakni pertama, perpustakaan yang perlu dibina. Kedua, perpustakaan yang perlu dikembangkan, dan ketiga, perpustakaan yang sudah maju atau sudah berjalan. Perpustakaan jenis yang ketiga ini dapat dijadikan mitra kerja untuk mengembangkan dan membina oleh Perpustakaan Nasional. Langkah tersebut dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan dilanjutkan dengan menjadi fasilitator forum-forum perpustakaan<sup>4</sup>. Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional mencakup seluruh kegiatan perpustakaan. Namun, karena keterbatasan peneliti, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas aspek pembinaan layanan perpustakaan, pembinaan bahan pustaka, pembinaan sumber daya manusia (pustakawan) dan pembinaan pengguna perpustakaan.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) hal. 134

<sup>4</sup> Agus Sutoyo, *Strategi dan Pemikiran Perpustakaan Visi Hernandono*. (Jakarta : Sagung Seto, 2001), hal 162.

## 1. Pembinaan Layanan Perpustakaan

Sebagai lembaga pembina dan pengembang perpustakaan, langkah awal yang harus dikerjakan adalah bagaimana menciptakan layanan prima. Pelayanan merupakan inti dari kegiatan perpustakaan. Kualitas suatu perpustakaan bergantung pada bagaimana pelayanannya yang berkaitan langsung dengan pemakai perpustakaan. Sedang, kualitas pelayanan berkaitan dengan pustakawan selaku subjek atau pelaku dari layanan perpustakaan. Peran pustakawan dalam menentukan layanan berkualitas atau tidak ditunjukkan secara implisit dari dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut pengguna perpustakaan yaitu pengguna merasa diharapkan kehadirannya dan pengguna merasa dilayani dengan baik<sup>5</sup>. Jika pelayanan yang diberikan pustakawan diterima sesuai dengan yang diharapkan pengguna perpustakaan, maka pelayanan dinilai berkualitas. Pelayanan lebih dari yang diharapkan maka pelayanan dinilai prima. Namun, jika lebih rendah maka buruk dan tidak berkualitas.

Setiap instansi pelayanan umum, memiliki kewajiban pelaksana layanan publik untuk memberikan layanan prima kepada pemakainya. Kewajiban ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Layanan Aparatur Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat serta Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Peraturan ini berlaku bagi perpustakaan milik instansi pemerintah, sedangkan untuk perpustakaan non pemerintah aturan untuk memberikan pelayanan terbaik tetap berlaku sesuai

---

<sup>5</sup> Luthfiana Makarim, *Pustakawan Idaman Pemakai: Sebuah Studi di PNRI*, dalam Media Pustakawan, Vol. 13 No. 3&4 Desember 2006, hal 15

dengan prinsip-prinsip profesionalitas.

Sebagai perpustakaan yang bersifat nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna ataupun pengunjungnya. Untuk melaksanakannya maka Perpustakaan Nasional menyelenggarakan sistem layanan.

**a. Sistem Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Sistem layanan yang diterapkan oleh Perpustakaan Nasional RI adalah layanan tertutup (*closed access*).

Sistem Akses Tertutup (*Closed Access*) yaitu sistem peminjaman koleksi yang tidak memperbolehkan pengunjung untuk masuk ke ruang penyimpanan bahan pustaka (ruang koleksi) untuk mencari bahan pustaka yang diinginkan. Pemakai perpustakaan nasional dapat mencari informasi melalui berbagai sarana penelusuran yang telah tersedia kemudian mengajukan bahan pustaka yang dipesan kepada petugas di bagian penyimpanan dengan menggunakan bon peminjaman.

Bahan pustaka hanya boleh dibaca di ruang baca dan tidak dapat dibawa keluar atau pulang. PNRI tidak menyediakan peminjaman untuk menghindari kehilangan bahan-bahan pustaka akibat kelalaian peminjaman. Hal ini dapat dimengerti, mengingat sebagian besar koleksi bahan pustaka yang ada di PNRI merupakan koleksi yang jarang ditemukan di luar (langka).

**Keuntungan** sistem layanan tertutup adalah:

- a. Susunan koleksi bahan pustaka tetap rapi;

Karena hanya petugaslah yang boleh mengambil bahan pustaka pesanan dari pengguna maka kondisi rak penyimpanan koleksi tetap dalam keadaan rapi dan teratur. Dengan keadaan yang tetap rapi dan teratur ini maka kelestarian bahan pustaka dapat terjaga dengan didukung pula oleh kondisi ruangan penyimpanan. Petugas di bagian sirkulasi lah yang bertanggungjawab terhadap kerapihan koleksi.

b. Frekuensi kerusakan dan kehilangan sedikit;

Setelah pengguna selesai menggunakan koleksi bahan pustaka, maka pengguna menyerahkan kembali kepada petugas di ruang baca untuk kemudian diletakkan kembali oleh petugas di tempat penyimpanan atau ruang koleksi. Karena tidak ada program pencatatan jumlah koleksi tiap tahun, maka jumlah koleksi yang hilang atau bertambah tidak tercatat dengan baik. Inilah salah satu kelemahan dari Perpustakaan Nasional RI terkait dengan sistem pengarsipan data.

c. Tidak banyak membutuhkan meja baca karena hanya pengguna yang mendapatkan informasi yang diperlukanlah yang menggunakannya.

Letak penempatan meja baca juga dapat disebar disetiap lantai yang bersisian dengan ruang koleksi.

Adapun **kerugian** dari sistem ini ialah:

a. Memerlukan banyak tenaga di bagian sirkulasi;

Peran dan kinerja pustakawan dalam bidang sirkulasi koleksi sangat penting dalam sistem layanan tertutup ini. Sebab tenaga di bidang inilah yang mengetahui tempat penyimpanan koleksi. Kecekatan menjadi hal

yang dominan karena dengan pengetahuan atau penguasaan rak atau ruang koleksi maka akan mempermudah penemuan koleksi sehingga pengguna tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu.

b. Kartu katalog cepat rusak;

Penggunaan kartu katalog menjadi kunci penelusuran bahan pustaka, sehingga kartu ini tentu paling sering digunakan yang kemudian menyebabkan kartu katalog mudah rusak. Pembaharuan kondisi kartu katalog harus dilakukan secara rutin agar pengguna dapat menemukan nomor panggil atau kode bahan pustaka dengan mudah.

c. Terdapat sejumlah koleksi yang tidak pernah dipinjam;

Hal ini dikarenakan pengguna tidak bisa menemukan informasi secara langsung dari koleksi bahan pustaka yang mungkin memiliki kesamaan isi. Sehingga ketika pengguna tidak menemukan subjek yang dicari maka ia tidak bisa memilah-milih bahan pustaka lain yang mungkin seimbang. Akibatnya terdapat beberapa koleksi yang jarang dipinjam atau digunakan.

d. Peminjam sering kecewa karena bahan pustaka yang diinginkan tidak ditemukan;

Dalam sistem layanan tertutup, keberadaan koleksi tidak tercatat secara akurat karena mungkin saja sedang dipinjam oleh pengguna yang lain sehingga terkadang bahan pustaka yang ingin dipinjam tidak ada di rak koleksi. Ketidaktersediaan bahan pustaka bisa juga dikarenakan pengguna kurang lengkap mengisi bon pemesanan sehingga petugas



kesulitan mencari.

e. Membuang energi

Telah disebutkan di atas bahwa dalam sistem layanan tertutup ini, dibutuhkan banyak tenaga di bidang sirkulasi sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu, pemborosan energi juga terjadi dalam hal penggunaan waktu oleh pengguna. Pengguna yang ingin memanfaatkan koleksi bahan pustaka harus membuang waktu antara 10-30 menit untuk mendapatkan bahan pustaka yang dipesannya.

Selain sistem layanan tertutup terdapat sistem lain yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional RI yang berlokasi di Jl. Merdeka Selatan 11 yakni sistem pelayanan terbuka bagi pengunjung anggota maupun non anggota. Sistem layanan terbuka adalah sistem peminjaman koleksi perpustakaan yang memungkinkan pengunjung untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang dikehendaki<sup>6</sup>. Sebagian besar koleksi yang terdapat dalam Perpustakaan Nasional yang berada di lokasi itu adalah jenis koleksi terbitan terbaru antara tahun 1990-an hingga koleksi paling baru (tahun 2008) yang meliputi bidang Agama, Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan Sejarah serta buku-buku non ilmiah dan karya sastra.

Penerapan sistem layanan terbuka, mempersilahkan pengunjung untuk mencari bahan koleksi yang dibutuhkan. Pengunjung yang datang di perpustakaan itu ada yang merupakan anggota tetapi ada juga yang non anggota. Perbedaannya terletak pada kepemilikan kartu anggota dan juga hak untuk

---

<sup>6</sup> Lasa Hs, *Kamus Istilah Perpustakaan*, (Yogyakarta : Gajah Madja University Press,(1998),hal 89

meminjam koleksi untuk dibawa pulang. Setiap anggota Perpustakaan Nasional RI layanan terbuka diperbolehkan meminjam koleksi untuk dibawa pulang dengan ketentuan :

- a. Setiap anggota boleh meminjam 3 buah buku untuk masa pinjam 1 minggu;
- b. Buku yang dipinjam dapat diperpanjang dengan cara datang langsung atau melalui telepon;
- c. Untuk perpanjangan yang kedua, peminjam harus datang langsung ke perpustakaan.

Dalam hal pembinaan sistem layanan perpustakaan, PNRI melakukan upaya pembinaan melalui pengenalan dan penyebarluasan informasi mengenai prosedur sistem layanan baik yang tertutup maupun yang terbuka.

**b. Bentuk Jasa Layanan dan Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.**

Di lingkungan PNRI terdapat Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi yang merupakan salah satu unit kerja yang bertugas menyelenggarakan kegiatan layanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat. Keberadaan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi itu sejak tahun 2000. Pada tahun 1997 hingga tahun 1999 biro ini bernama Pusat Layanan Informasi yang kegiatannya meliputi :

- a. Penelusuran informasi ilmiah berupa layanan dan bimbingan mengenai penelusuran literatur ilmiah dari berbagai sumber yang relevan dari suatu penelitian lokal, nasional maupun internasional.
- b. Konsultasi penyelenggaraan perpustakaan berupa pemberian layanan

konsultasi tentang penyelenggaraan layanan perpustakaan dari perorangan maupun lembaga. Layanan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Perpustakaan Nasional terhadap perpustakaan perseorangan atau perpustakaan lembaga. Bentuk layanan yang diberikan bagaimana cara mendirikan perpustakaan, mengumpulkan koleksi bahan pustaka, pemenuhan perlengkapan suatu perpustakaan, sistem pengarsipan dan penomoran bahan pustaka yang terkait dengan dunia pustaka.

- c. Perpustakaan Nasional juga menerima dan melayani kunjungan secara berkelompok dari kalangan siswa, mahasiswa, peserta pendidikan dan pelatihan, dan profesi. Dalam layanan kunjungan ini, para pengunjung akan diberikan informasi seputar Perpustakaan Nasional melalui pemutaran film di aula Perpustakaan Nasional, setelah itu peserta diberikan untuk berkunjung ke setiap lantai dan ruangan untuk melihat berbagai fasilitas yang tersedia.
- d. Selain itu juga, terbuka kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan, peserta pendidikan dan pelatihan atau petugas perpustakaan.
- e. Layanan lain yang tersedia adalah pelayanan permintaan pembuatan kliping berita dan artikel dari surat kabar serta majalah koleksi Perpustakaan Nasional RI.
- f. Perpustakaan Nasional memberikan pelayanan untuk permintaan alih media dan reproduksi bahan pustaka tercetak ke dalam format digital, fotografi, mikrofilm dan mikrofis yang berisi tentang artikel surat kabar

dan majalah dari terbitan masa kolonial Belanda, film dokumenter seni dari berbagai budaya daerah dan juga internasional. Kegiatan alih media ini sangat memperhatikan hak cipta dan kondisi bahan pustaka yang bersangkutan agar tidak merusak bahan pustaka yang asli. Bagi pengguna yang tidak datang secara langsung, dapat mengirimkan data koleksi yang diperlukan melalui surat, faksimile, email atau telepon. Jika koleksi yang diinginkan tersedia, petugas akan menjawab melalui surat, faksimile, email atau telepon dan akan mengirimkan rincian biaya yang dibebankan kepada pemesan. Petugas akan mengirimkan hasil alih media tersebut bila sudah ada persetujuan dari pemesan.

- g. Salah satu koleksi unggulan Perpustakaan Nasional adalah koleksi berupa artikel surat kabar dan majalah terbitan sebelum Perang Dunia II sampai terbitan terbaru. Untuk memudahkan pengguna atau kolektor suatu subjek artikel tertentu, maka Perpustakaan Nasional memberikan layanan pembuatan indeks dari artikel-artikel tersebut sesuai dengan topik-topik yang diinginkan pengguna.
- h. Selain koleksi bahan pustaka berupa artikel surat kabar dan majalah terbitan sebelum Perang Dunia II sampai terbitan terbaru, Perpustakaan Nasional juga memiliki koleksi berupa naskah nusantara atau manuskrip dan koleksi langka. Untuk itulah, Perpustakaan Nasional menyediakan layanan berupa permintaan alih aksara (transliterasi) naskah nusantara dan koleksi langka dari aksara daerah ke aksara latin dan pelayanan alih bahasa (terjemahan) dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Seluruh layanan yang disediakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan jadwal layanan:

Senin-Jum'at : 09.00 – 16.00 WIB  
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB  
Sabtu : 09.00 – 13.30 WIB

Untuk pemesanan bahan pustaka dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum jam layanan ditutup.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa, pada tahun 2000 biro ini Pusat Layanan Informasi berubah nama menjadi Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dengan penambahan layanan yang diberikan yakni :

- a. Jasa informasi yang akan melayani pertanyaan dan permintaan informasi tentang berbagai hal atau subjek yang berkaitan dengan Perpustakaan Nasional RI;
- b. Jasa rujukan bermaksud untuk meneruskan dan menyalurkan pertanyaan atau permintaan informasi yang tidak tersedia di Perpustakaan Nasional ke lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun luar negeri melalui jaringan kerjasama informasi.

**c. Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Untuk mendukung pemenuhan layanan prima, PNRI memiliki beberapa fasilitas pendukung berupa :

- 1). Ruang baca yang dilengkapi AC di lantai 1-8 dengan sarana meja dan kursi baca. Ruang baca terletak di sisi lain ruang koleksi ataupun di depan ruang koleksi. Untuk beberapa jenis koleksi tidak diperkenankan membawa koleksi ke lantai lain, seperti koleksi buku langka, koleksi naskah kuno, peta dan

lukisan, koleksi majalah dan surat kabar terjilid serta koleksi audio visual. Fasilitas ruang baca dilengkapi dengan AC untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna perpustakaan. Jumlah meja dan ruang baca pun memadai untuk memfasilitasi pengguna yang ingin membaca dan mencari informasi dari bahan pustaka.

2). Sarana penelusuran koleksi dalam bentuk katalog manual dan OPAC (*Online Public Access Cataloging*). Tempat penyimpanan katalog manual terdapat di setiap lantai dekat dengan ruang koleksi. Penyusunan katalog manual berdasarkan subjek informasi dan juga berdasarkan penulis serta penerbit. Katalog manual ini terdiri dari kartu katalog dan juga katalog buku, katalog berkas, kartu pencatatan majalah, daftar dan indeks yang telah disusun secara sistematis.

3). Mesin fotocopy di lantai 1, 3,5B dan 8C. Untuk pelayanan fotocopy, pengunjung di bebaskan biaya yang beraneka tergantung pada sifat langka dan umur koleksi, semakin langka dan tua umurnya maka biayanya semakin tinggi. Tidak semua koleksi boleh difotocopy, koleksi yang sudah rapuh sebaiknya direproduksi dan dialih mediakan.

4). Peralatan reproduksi dan alih media bahan pustaka diperuntukan bagi koleksi yang sudah tua dan rapuh. Ini dimaksudkan agar proses pengambilan informasi tidak merusak bentuk asli fisik koleksi sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain di waktu mendatang.

5). Ruang Audio Visual digunakan untuk menikmati koleksi bahan pustaka berupa film dokumenter dan koleksi bahan pustaka yang telah dialihmediakan;

6). Loker penitipan barang terletak di lobby Perpustakaan Nasional, pengunjung yang datang dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menyimpan barang pribadi berupa tas. Barang pribadi yang diperkenan di bawa ke ruang baca adalah alat tulis dan benda berharga. Terdapat 5 rangkaian rak penitipan tas dengan total loker 200 unit.

Melihat luasnya kegiatan dan luasnya jangkauan wilayah Indonesia, hasil dari usaha Perpustakaan Nasional dalam melancarkan layanan prima ini belum terasa imbasnya secara nasional. Hal ini ditambah lagi dengan terbatasnya alokasi anggaran menyebabkan layanan perpustakaan belum optimal tetapi hendaknya seluruh komponen Perpustakaan Nasional harus terus berupaya dengan berbagai daya dan inovasi<sup>7</sup>. Pembinaan Perpustakaan Nasional terhadap Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus dalam hal layanan disampaikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh forum-forum perpustakaan tersebut. Keempat jenis perpustakaan tersebut memiliki forum perpustakaan yang dapat dijadikan mitra Perpustakaan Nasional dalam membina perpustakaan dan inovasi-inovasi baru dalam layanan perpustakaan.

## **2. Pembinaan Bahan Pustaka**

Bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah,

---

<sup>7</sup> Agus Sutoyo, *Op.Cit.*, hal 163

dan dilayankan disebut dengan koleksi perpustakaan<sup>8</sup>.

Penyelenggaraan perpustakaan dikatakan berhasil jika ditentukan oleh kualitas tenaga pustakawan, kualitas koleksi bahan pustaka yang meliputi jenis, variasi, relevansi kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan pemakai. Agar kualitas koleksi bahan pustaka dinilai baik maka, harus ada kegiatan pengembangan dan pembinaan koleksi bahan pustaka. Tujuannya adalah agar koleksi bahan pustaka tetap sesuai dengan keperluan masyarakat pemakai, dan jumlah koleksi bahan pustaka selalu mencukupi. Mutu koleksi bahan pustaka dibentuk oleh kegiatan pengembangan koleksi ini. Kegiatan pengembangan koleksi bahan pustaka terdiri dari kegiatan :

1. Menyusun rencana operasional pengembangan koleksi,
2. Menghimpun alat seleksi koleksi bahan pustaka dengan mengumpulkan semua sumber informasi literatur yang akan dipakai dalam proses penyeleksian dan penentuan bahan pustaka yang akan diadakan. Sumber-sumber tersebut berupa katalog penerbit, bibliografi, buletin abstrak dan indeks, dan brusur terbitan baru.
3. Melakukan survei minat pemakai dengan tujuan untuk mengetahui bidang/subyek yang diminati pemakai, jenis bahan pustaka yang diperlukan, termasuk jenis layanan yang dikehendaki. Survei sederhana yang dilakukan dapat berupa wawancara yang dilakukan oleh pustakawan kepada para pemakai potensial yang rajin menggunakan perpustakaan.
4. Survei bahan pustaka dengan mengamati langsung keberadaan bahan

---

<sup>8</sup> UU RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, hal 3-4.



pustaka di toko buku, pameran dan perpustakaan lainnya.

5. Menyeleksi bahan pustaka dengan melibatkan Tim Ahli dan perwakilan masyarakat pembaca. Dalam proses inilah, mutu koleksi bahan pustaka ditemukan.
6. Pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan dengan membeli/langganan, tukar menukar penerbitan (perjanjian kerjasama dengan penerbit).
7. Meregistrasi koleksi bahan pustaka dengan mencatat identitas bahan pustaka pada buku induk atau cardex dan sejenisnya atau secara elektronik ke pangkalan data-komputer. Data yang didaftarkan meliputi : nama pengarang, judul buku, tanggal diterima di perpustakaan, tahun terbit, edisi keberapa, dan nama penerbit. Setiap eksemplar pustaka harus didaftar tersendiri dan masing-masing diberi nomor induknya.

Untuk melakukan pembinaan terhadap koleksi bahan pustaka, diperlukan sebuah perencanaan yang cermat oleh seorang kepala perpustakaan, staff perpustakaan dan instansi induk perpustakaan serta masyarakat pengguna layanan dan jasa perpustakaan.

#### **a. Kebijakan Dalam Pembinaan Koleksi**

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kebijakan pembinaan koleksi perpustakaan yaitu<sup>9</sup> :

- a. Relevansi

Koleksi yang dimiliki perpustakaan hendaknya relevan dengan tujuan atau

---

<sup>9</sup> H.M Ardi Siswanto. *Pengembangan Sistem Instruksional Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Koleksi Perpustakaan Sebagai Pusat Sumber Belajar*, dalam *Al-Maktabah (Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan)*, Vol. 3 No. 1 April 2001, hal 8-9

misi institusi induk tempat perpustakaan bernaung agar tujuan pelaksanaan perpustakaan dapat tercapai. Jenis perpustakaan ini biasanya dimiliki oleh perpustakaan lembaga yang didirikan untuk mendukung kinerja lembaga tersebut. Karena sifatnya yang nasional, maka jenis koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan Nasional RI mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia dari masa ke masa.

b. Berorientasi kepada kebutuhan pengguna

Koleksi dan pengembangan koleksi perpustakaan harus bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pengguna. Ini penting mengingat tujuan utama dari kegiatan perpustakaan adalah menyediakan koleksi bahan pustaka untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Jika koleksi bahan pustaka merupakan koleksi yang banyak diminati oleh pengguna maka koleksi tersebut akan lebih bermanfaat. Masyarakat pemakai PNRI sebagian besar adalah dari kalangan akademisi seperti mahasiswa dan peneliti, oleh karenanya koleksi bahan pustaka yang tersimpan di PNRI adalah koleksi yang mendukung kegiatan penelitian terutama dalam bidang sosial dan sejarah.

c. Kelengkapan

Jenis koleksi tidak hanya terbatas pada buku saja dan mencakup berbagai jenis media yang ada. Namun, kondisi ini juga tetap disesuaikan dengan kebijakan instansi perpustakaan itu berada. Untuk perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi maka koleksi perpustakaan merupakan koleksi yang mendukung kegiatan pembelajaran dan ilmu yang dikembangkan.

d. Kemutakhiran

Perpustakaan harus mengadakan koleksi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini yang cenderung berkembang sangat cepat dengan berbagai kegiatan penelitian yang dikembangkan. Unsur kemutakhiran ini sangat penting sebab manusia cenderung ingin mengetahui hal baru yang terjadi dan informasi terbaru yang ada. Usaha yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk memutakhirkan koleksinya melalui kegiatan pembelian buku atau koleksi atau juga melalui hibah/hadiah dari penerbit sehubungan dengan adanya kewajiban serah terima karya cetak atau rekam.

e. Kerjasama

Pengembangan koleksi perpustakaan merupakan hasil kerjasama semua pihak agar dapat terimplementasikan secara efektif dan efisien. Kerjasama ini dilakukan dalam upaya untuk saling melengkapi koleksi perpustakaan untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna perpustakaan. Kerjasama dapat dilakukan oleh dua perpustakaan atau lebih baik yang sejenis maupun berbeda untuk keragaman koleksi. Saat ini Perpustakaan Nasional telah melakukan kerjasama dengan berbagai perpustakaan baik yang ada di daerah maupun yang ada di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia dan tentunya Belanda. Kerjasama dengan perpustakaan di negeri Belanda berkaitan dengan banyaknya arsip dan peninggalan ataupun informasi yang berkaitan dengan Indonesia sebelum kemerdekaan. Selain menjalin kerjasama dengan berbagai perpustakaan negara tetangga, PNRI juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berkecimpung dalam bidang teknologi dan informasi.

Koleksi perpustakaan harus memiliki fungsi<sup>10</sup>:

a. Fungsi Pendidikan.

Perpustakaan mengadakan bahan yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan masyarakat pemakai agar informasi yang terkandung di dalam koleksi tersebut bermanfaat optimal dan tepat sasaran.

b. Fungsi Umum

Sebuah perpustakaan bertugas untuk menyediakan berbagai macam subjek untuk pemakai aktif, maupun pemakai yang belum aktif agar suatu saat dapat datang untuk memanfaatkan jasa dan layanan perpustakaan.

**b. Jenis Koleksi Bahan Pustaka**

Sejak awal proses pembentukannya, koleksi Perpustakaan Nasional RI sebagian besar merupakan koleksi Perpustakaan Museum Nasional. Seperti halnya dengan data perkembangan jumlah Perpustakaan daerah, data mengenai penambahan jumlah koleksi pun tidak tercatat dengan baik setiap tahun. Data yang ada merupakan data yang diperoleh berdasarkan program inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2001. Meskipun demikian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki beberapa koleksi bahan pustaka berupa :

1. Buku, dengan kategori

- a. Koleksi bahan pustaka baru dan reference yang terdiri dari 77.257 judul

---

<sup>10</sup> Siti Sumarningsih, *Pengembangan Koleksi Perpustakaan*, dalam *Al-Maktabah (Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan)*, Vol. 3 No. 1 April 2001.,hal 1-2

dengan 103.936 eksemplar. Koleksi bahan pustaka baru meliputi bidang ilmu filsafat, agama, Ilmu-ilmu sosial, ekonomi, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan (teknologi), kesenian, kesusasteraan dan sejarah serta geografi.

- b. Buku langka terbitan abad ke-18 dalam berbagai disiplin ilmu, kumpulan reproduksi foto-foto Jakarta tempo dulu, kumpulan ilustrasi tentang Indonesia, koleksi bertanda *ster*(\*) dengan keunikan yang berukuran besar dan dilengkapi dengan foto yang menarik, dan disertasi berbahasa Belanda sekitar tahun 1830-1940. Jumlah koleksi buku langka merupakan jumlah terbesar dengan 211.840 eksemplar yang terdiri dari 153.203 judul buku.
  - c. Koleksi buku tentang presiden Soekarno berupa biografi, autobiografi, dan kumpulan pidato.
  - d. Koleksi varia yakni bahan pustaka unik dan langka yang terdapat pada lembaran-lembaran lepas yang terkumpul dalam kotak karton.
  - e. Koleksi terlarang yang merupakan bahan pustaka yang memuat paham/ideologi yang dilarang pada orde baru. Jumlah koleksi buku terlarang yang ada mencapai angka 481 judul dengan jumlah 719 eksemplar.
  - f. Koleksi deposit kolonial Belanda dan koleksi berhuruf *braille*.
2. Koleksi surat kabar terbitan masa kolonial Belanda, Jepang, masa awal kemerdekaan dan periode 1950 hingga terbitan 2000 yang jumlahnya mencapai 1.707 judul dengan 1.285.250 eksemplar.
  3. Koleksi majalah sebelum Perang Dunia II hingga 2000. Terdapat 144.096 eksemplar yang meliputi 19.433 judul.

4. Koleksi klipng berupa guntingan berita dan artikel dari berbagai surat kabar.
5. Koleksi literatur kelabu yang terdiri dari laporan penelitian, makalah seminar tesis dan disertasi.
6. Koleksi peta terbitan 1969 hingga tahun 2000 berjumlah 25.298 eksemplar mencakup 19.244 judul. Untuk peta atlas, jumlahnya 125 eksemplar meliputi 125 judul.
7. Koleksi lukisan yang berjumlah 533 judul dan eksemplar berupa reproduksi lukisan arkeologi Indonesia, candi, patung-patung, keris, dan sebagainya.
8. Koleksi audio visual merupakan koleksi bahan pustaka dalam bentuk mikrofilm (6.099 judul), mikrofis (13.539 judul, 49.866 eksemplar), kaset (188 judul, 456 eksemplar), cd (108 judul, 252 eksemplar), video (313 judul, 370 eksemplar) dan foto (246 judul, 13.603 eksemplar) yang memuat berbagai jenis film dan tayangan.
9. Koleksi manuskrip atau naskah nusantara dari dalam dan luar negeri.

Koleksi naskah nusantara adalah koleksi naskah tulisan tangan yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa daerah<sup>11</sup>, seperti aksara dan bahasa Jawa, Bali, Madura, Bugis, Lampung, Batak, Kaganga, Latin, Arab Pegon dan lain-lain yang merupakan bahasa daerah yang banyak digunakan pada naskah nusantara. Secara umum, muatan yang terdapat dalam berbagai naskah nusantara itu berisi dongeng, hikayat, cerita rakyat, babad, silsilah, sejarah, primbon, surat-surat perjanjian, tata cara upacara adat, hukum, undang-undang, syair dan tata bahasa. Penyimpanan koleksi manuskrip terdapat di

---

<sup>11</sup> Sri Redjeki,dkk, *Panduan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional*. ( Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2005) hal 20

lantai VB dengan jumlah koleksi 8.436 judul dan 9.427 eksemplar.

Koleksi unggulan naskah nusantara yang dimiliki Perpustakaan Nasional antara lain adalah Negara Kertagama, Pararaton, Dampati lalangan, Sureq Baweng, Al-Qur'an dari Aceh dan Banten. Selain itu terdapat pula sejumlah manuskrip asing berasal dari Arab, Myanmar, Siam, Kamboja, Jepang dan Cina. Naskah nusantara ini biasanya menggunakan media berupa lontar, kulit kayu, labu hutan, rotan, kayu, bambu, kertas, dan lain-lain.

Tabel III.2  
Daftar Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hingga tahun 2000<sup>12</sup>

No.	Jenis Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1.	Peta , Peta Atlas dan Lukisan	19.902	26.616
2.	Bahan Pustaka Baru Dan Reference	77.257	103.936
3.	Audo Visual berupa:		
	Mikrofilm	6.099	6.099
	Mikrofis	13.539	49.866
	Foto	246	13.603
	Video	313	370
	Kaset	188	456
	CD	108	252
4.	Buku Langka berupa:		
	Terbitan Abad ke-18	77.355	93.062
	Koleksi Varia	43.923	53.959
	Tentang Presiden Soekarno	31.925	64.719
	Buku Terlarang	481	719
5.	Manuskrip	8.436	9.427

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Kajian Persepsi Pemakai Terhadap Perpustakaan Nasional RI*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2001) hal 17-18.

6.	Majalah Terjilid	19.433	144.096
7.	Surat Kabar Terjilid	1.707	1.285.250

### c. Upaya Pembinaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga yang membina dan mengembangkan perpustakaan, melakukan tugasnya dalam hal yang berkaitan dengan bahan pustaka meliputi :

- a. Menjalin kerjasama dengan beberapa perpustakaan untuk mengumpulkan bahan pustaka. Kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian-perjanjian untuk saling melengkapi koleksi perpustakaan. Kegiatan pengumpulan bahan pustaka dilakukan dengan melakukan pembelian rutin, hadiah dari penerbit atau instansi tertentu serta proyek pengadaan bahan pustaka.
- b. Pertemuan dengan perwakilan utusan berbagai perpustakaan untuk mensosialisasikan sistem nasional perpustakaan dan kebijakan baku Perpustakaan Nasional RI. Kebijakan yang diterapkan oleh Perpustakaan Nasional untuk pengelolaan bahan pustaka juga mencakup sistem penyimpanan.

Sistem penyimpanan koleksi berupa buku disusun berdasarkan nomor klasifikasi dalam DDC (*Dewey Decimal Classification*)<sup>13</sup>. Susunan dimulai dari nomor klasifikasi 000 (karya umum), 100 (Filsafat), 200 (Agama), 300 (Ilmu Sosial), 400 (Bahasa), 500 (Ilmu Murni), 600 (Teknologi Terapan), 700 (Kesenian), 800 (kesusasteraan), 900 (sejarah dan Geografi).

---

<sup>13</sup> Sri Redjeki, *Op.Cit.. hal 20.*,



Sebagai identitas, setiap bahan pustaka memiliki nomor panggil yang terdiri dari nomor klasifikasi, tiga huruf pertama nama pengarang/badan/lembaga, dan satu huruf pertama judul buku.

Selain sistem penyimpanan buku, PNRI juga mengembangkan sistem penyimpanan koleksi bahan pustaka lain dengan menggunakan sistem klasifikasi lokal yang disesuaikan dan dikembangkan sendiri. Umumnya, nomor panggil bahan pustaka mewakili subjek, nomor urut koleksi, tahun terbit, dan nama kolektor/badan/lembaga.

Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka agar setiap bahan pustaka selalu terpelihara atau terawat sehingga usianya menjadi panjang, peletakkan di rak selalu teratur dan keadaannya selalu bersih. Kegiatan menyimpan dan merawat bahan pustaka dilakukan melalui identifikasi bahan pustaka (mengecek bahan pustaka yang rusak dan memerlukan perawatan atau perbaikan, pengecekan kelengkapan koleksi, menentukan dan menyusun jadwal fumigasi), mengelola jajaran bahan pustaka oleh Asisten Pustakawan Pratama, merawat bahan pustaka dengan melakukan tindakan sebelum dan sesudah bahan pustaka mengalami kerusakan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam merawat bahan pustaka adalah mereproduksi bahan pustaka yang penting tetapi keadaannya sudah tua, bahan pustaka langka dan bahan pustaka yang mempunyai nilai historis (sejarah) yang harus disimpan selama-lamanya.

### 3. Pembinaan Sumber Daya Manusia ( Pustakawan)

Sumber daya manusia yang terdapat di suatu perpustakaan biasa disebut dengan pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan<sup>14</sup>. Selain pustakawan, ada tenaga perpustakaan lainnya yang merupakan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, dan tenaga teknis ketatausahaan<sup>15</sup>. Untuk menjadi pustakawan, seseorang harus memiliki kompetensi tentang perpustakaan namun, untuk menjadi seorang tenaga teknis perpustakaan tidak harus memiliki dan mengetahui mendalam mengenai perpustakaan. Inilah yang membedakan diantara keduanya tetapi, tidak ada salahnya jika seorang tenaga teknis perpustakaan pun mengetahui dan memahami mengenai ilmu perpustakaan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan meliputi kompetensi profesional dan kompetensi personal<sup>16</sup>. Kompetensi profesional mencakup pengetahuan yang dimiliki pustakawan dalam bidang sumber daya informasi, akses informasi, manajemen dan penelitian serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai basis dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi yang disebut terakhir akan mendukung kompetensi

---

<sup>14</sup> UU RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, hal 4.

<sup>15</sup> Ibid., hal 40.

<sup>16</sup> Blasius Sudarsono, *Antologi Kepustakawanan Indonesia*, (Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia dan Sagung seto, 2006.), hal 150.

personal pustakawan. Kompetensi personal yang harus dimiliki meliputi keahlian/keterampilan, sikap dan nilai yang mendukung sikap efisien dalam bekerja, mampu berkomunikasi yang baik dan paham serta menerapkan etika profesi perpustakaan. Untuk memiliki dua unsur kompetensi tersebut, jalur pendidikan dan pelatihan dapat ditempuh oleh seorang pustakawan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.

Pembinaan dan pengembangan karir tenaga perpustakaan dan pustakawan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur formal atau pendidikan formal di bidang perpustakaan, dan jalur non-formal atau pelatihan dan sejenisnya<sup>17</sup>.

#### 1. Pembinaan dan Pengembangan Melalui Jalur Formal

Pembinaan dan pengembangan melalui jalur formal dilakukan dengan pembukaan program jurusan ilmu perpustakaan oleh perguruan tinggi atau universitas negeri dan swasta mulai dari tingkat Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Hingga saat ini terdapat 21 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program D2 sampai S2 Ilmu Perpustakaan dengan animo yang cukup besar dari masyarakat<sup>18</sup>. Perpustakaan Nasional melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi agar ilmu perpustakaan banyak dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Kondisi ini penting untuk keberlangsungan kegiatan perpustakaan dan perkembangan ilmu perpustakaan itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Agus Sutoyo, *Op.Cit*, hal 69.

<sup>18</sup> *Op. Cit.*, hal 94.

Tabel III.3  
Perguruan Tinggi Penyelenggara Ilmu Perpustakaan<sup>19</sup>

No.	Perguruan Tinggi	Tahun Berdiri	Jenjang	Lokasi
1.	Universitas Indonesia	1952	D3, S1, S2	Jakarta/Depok
2.	UPI Bandung	1974-1984	S1	Bandung
3.	Universitas Hasanudin	1978	D3, S1	Makasar
4.	Universitas Sumatera Utara	1980	D3, S1	Medan
5.	Institut Pertanian Bogor	1982	D3	Bogor
6.	Universitas Airlangga	1982	D3	Surabaya
7.	Universitas Padjajaran	1984	S1	Bandung/Jatinangor
8.	Universitas Islam Nusantara	1984	S1	Bandung
9.	Universitas Gadjah Mada	1986	S2	Yogyakarta
10.	Universitas Lancang Kuning	1990	D3	Pekanbaru
11.	Universitas Sam Ratulangie	1992	D3	Manado
12.	Universitas YARSI	1993/1999	D3/S1	Jakarta/Cempaka Putih
13.	Universitas Diponegoro	1997	D3	Semarang
14.	Universitas Terbuka	1993	D2	Jakarta/Pondok Cabe
15.	Universitas Lampung	1998	D3	Bandar Lampung
16.	Universitas Bengkulu	1997/1998	D3	Bengkulu
17.	IAIN Ar-Raniry, NAD	1995	D3	Banda Aceh
18.	IAIN Imam Bonjol	1998	D2	Padang
19.	IAIN Syarif Hidayatullah	1999	S1	Jakarta/Ciputat
20.	IAIN Sunan Kalijaga	1998	S1	Yogyakarta
21.	Universitas Wijayakusuma	2000	D3	Surabaya

## 2. Pembinaan Melalui Jalur Non-Formal

Selain pembinaan dan pengembangan melalui jalur formal, usaha pengembangan karir bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan dapat juga dilakukan melalui jalur non-formal atau pelatihan-pelatihan di bidang perpustakaan

<sup>19</sup> Sukarma (Soekarman) Kertosedono, ...[et al.], *Seperempat Abad Perpustakaan Nasional 1980-2005*, hal 94

dan kedinasan. Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya semakin mengakomodasikan pelatihan-pelatihan di bidang perpustakaan<sup>20</sup>. Saat ini tenaga perpustakaan dan pustakawan dapat mengikuti 4 macam pelatihan, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Pelatihan penyetaraan bagi calon tenaga pustakawan yang berlangsung selama 728 jam atau sekitar 4 bulan yaitu Diklat tenaga Teknis Perpustakaan. Para peserta atau lulusan diklat ini dapat diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI untuk menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan.
- b. Pelatihan Pustakawan Berjenjang bagi Asisten Pustakawan (tenaga terampil) dan Pustakawan (tenaga ahli). Pelatihan dilaksanakan mulai tahun anggaran 1999/2000, selaras dengan Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengisyaratkan adanya kegiatan keterampilan dan keahlian.
- c. Pelatihan Topik/Subyek Kepustakawan seperti Pelestarian Bahan Pustaka, Otomasi Perpustakaan, Etika Layanan dan Promosi Perpustakaan, serta Penyuluhan Bibliografi. Pelatihan ini akan selalu dikembangkan topik dan subyeknya sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional.
- d. Pelatihan Kedinasan/Struktural. Jenis diklat ini dapat dan perlu diikuti tenaga perpustakaan dan pustakawan (tenaga-tenaga non struktural) yang sering “terlewat” atau “dilupakan”, dalam rangka pembinaan dan

---

<sup>20</sup> Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998

<sup>21</sup> Agus Sutoyo, *Op. Cit.*, hal 69-71

pengembangan karir mereka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Diklat bagi PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Syarat Menduduki Jabatan Struktural bagi PNS.

Upaya untuk membina dan mengembangkan tenaga perpustakaan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan induk lembaga tempat perpustakaan. Hingga tahun 2001, tenaga pustakawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional berjumlah 5.209 orang. Untuk keseluruhan jumlah tenaga perpustakaan mencapai 48.200 orang tenaga yang mengabdikan diberbagai perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus.

Peran pustakawan sangat besar dalam menentukan mutu suatu perpustakaan. ini disebabkan oleh pustakawan memiliki tanggungjawab untuk memasyarakatkan perpustakaan, mengumpulkan informasi dari berbagai bahan pustaka, serta yang lebih berat lagi adalah mengembangkan minat baca masyarakat. Telah dijelaskan dalam bagian terdahulu, perpustakaan merupakan institusi pelayanan masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan prima bagi para pengguna. Pelayanan prima harus didukung oleh kesadaran bekerja sepenuh hati agar hasil yang diberikan kepada pengguna memuaskan dan terbaik.

Banyak dari tenaga pustakawan sebenarnya tidak mencita-citakan diri sebagai pustakawan dan menganggap pustakawan sebagai profesi yang tidak menghasilkan dan tidak bergengsi. Ini bisa dimengerti karena sebagian besar

tenaga perpustakaan merupakan jabatan struktural yang tidak menjanjikan jaminan kesejahteraan dan bukan sebagai jabatan fungsional pemerintahan. Perasaan seperti inilah yang kemudian mengakibatkan kinerja seorang pustakawan tidak optimal dan bersikap acuh. Pustakawan seperti ini cenderung pasif dan menunggu suatu pekerjaan untuk dikerjakan, bukan malah berusaha untuk mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Bahkan ada slogan “ada pengunjung syukur, tidak ada pengunjung *nganggur*”<sup>22</sup> seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku Deputy pengembangan pustakawan dalam wawancara beberapa waktu lalu. Slogan yang seperti ini yang harus dihilangkan, karena sejatinya banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pustakawan berkaitan dengan tugasnya mengumpulkan informasi dari manapun.

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dunia pustaka, maka pustakawan hendaknya terbiasa dengan membaca dan menulis. Namun, keadaannya saat ini sedikit sekali pustakawan yang gemar membaca dan bahkan menjadi penulis. Jadi seharusnya, selain mengkampanyekan budaya membaca kepada masyarakat luas, Perpustakaan Nasional seharusnya membudayakan baca kepada para pustakawan itu sendiri sebagai pihak yang mengelola informasi.

#### **4. Strategi Pembinaan Masyarakat Pemakai**

Kebutuhan pemakai jasa perpustakaan terdiri dari koleksi, informasi layanan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang memungkinkan perpustakaan itu mampu melengkapi kebutuhan pemakai jasa perpustakaan dengan cepat dan tepat.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Drs. Supriyanto, tanggal 1 November 2008, di Jakarta

Seperti penyediaan komputer, CD-ROM, Microfilm, tapeslide serta sumber-sumber referens yang lengkap dan mutakhir. Cara yang dapat dilakukan bisa seperti jasa silang layan untuk melengkapi kebutuhan informasi yang tidak tersedia di perpustakaan setempat dengan perpustakaan lain sejenis, maupun dengan pusat-pusat dokumentasi dan informasi ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Jenis koleksi yang beragam informasi yang setiap saat berkembang dengan cepat, serta perkembangan teknologi di bidang sarana pengelolaan dan penelusuran nformasi terbaru yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan efektif dan efesien<sup>23</sup>. Namun, disadari atau tidak bahwa para pemakai jasa perpustakaan tersebut tidak seluruhnya memahami bagaimana cara memanfaatkan informasi dan fasilitas perpustakaan secara benar. Alasannya karena mereka belum memahami teknik dan strategi bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan efektif dan efesien. Untuk itu diperlukan pemberian pendidikan pemakai jasa perpustakaan (*user education*), yaitu salah satu layanan jasa perpustakaan yang memberikan pendidikan tentang teknik dan strategi untuk memanfaatkan perpustakaan dengan tepat guna. Berbagai upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat pemakai (pengunjung) Perpustakaan Nasional RI. Seperti halnya dengan data statistika lainnya, data pengunjung Perpustakaan Nasional RI hanya tercatat sejak tahun 2000. Penyebabnya adalah sistem pengarsipan yang tidak baik dan juga tidak adanya pewarisan data dari petugas atau pejabat lama kepada penggantinya. Oleh

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Woro Titi Haryanti, MA, pada tanggal 28 Oktober 2008, di Jakarta.

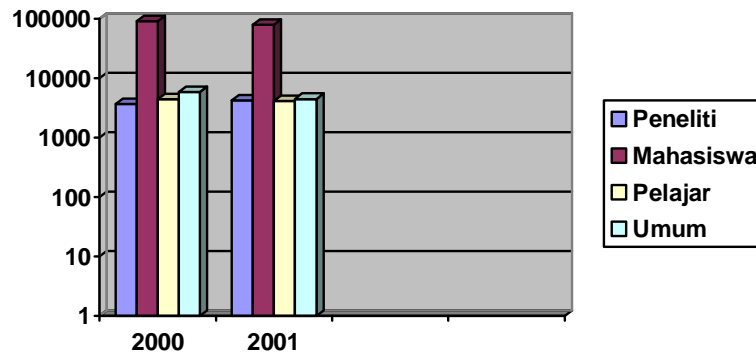


karena itu, penulis hanya berhasil menyajikan data pengunjung pada tahun 2000 dan tahun 2001 seperti yang tertera dalam tabel dan diagram di bawah ini<sup>24</sup> :

Tabel III. 4  
Data Pengunjung Perpustakaan Nasional RI

Tahun	Peneliti	Mahasiswa	Pelajar	Umum	Jumlah
2000	3685	91050	4435	5806	108256
2001	4211	78770	4176	4484	95395

Diagram 1  
Data Pengunjung Perpustakaan Nasional



#### a. Tujuan Pendidikan Pemakai Jasa Perpustakaan (*User Education*)

Secara umum, para pemakai jasa perpustakaan menghendaki agar informasi yang diinginkan lebih cepat didapatkan sedangkan para petugas pelayanan dituntut lebih terampil dalam membantu memberikan pelayanan. Untuk menjaga keharmonisan antara pemakai dan petugas pelayanan pembaca, maka perlu diadakan pendidikan pemakai jasa perpustakaan (*user education*). Menurut Soerono, tujuannya memberikan kemampuan atau keterampilan kepada para pemakai jasa perpustakaan untuk menggunakan perpustakaan serta lebih efektif

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Kajian Persepsi Pemakai Terhadap Perpustakaan Nasional RI*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2001) hal 34.

dalam rangka menunjang kegiatan belajar mereka<sup>25</sup>.

Sedangkan menurut Rr. Ratnaningsih, pendidikan pemakai jasa perpustakaan (*user education*) bertujuan<sup>26</sup> agar mereka:

- a. Mengetahui fasilitas yang tersedia di lingkungan perpustakaan agar dapat digunakan secara tepat dan bermanfaat;
- b. Mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi;
- c. Mengetahui tata letak gedung, ruang, koleksi serta layanan yang tersedia;
- d. Mengetahui cara menggunakan katalog, komputer, media teknologi lainnya;
- e. Mampu memanfaatkan perpustakaan secara maksimal dengan efektif dan efisien;
- f. Mampu menemukan koleksi dengan cepat dan tepat;
- g. Dapat menggunakan sumber-sumber penelusuran referensi dengan baik secara tradisional maupun media elektronik yang tersedia;
- h. Termotivasi senang belajar di perpustakaan.

#### **b. Strategi Pendidikan Pemakai Jasa Perpustakaan (*User Education*)**

Menurut Yunus Winoto, dalam strategi pendidikan pemakai jasa perpustakaan (*user education*) terdapat 3 unsur pokok yang perlu mendapat

---

<sup>25</sup> Anwar Syamsudin. *Peranan Pendidikan Pemakai Terhadap Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, dalam *Al-Maktabah*, Vol. 3, No. 2 Oktober 2001, hal. 167

<sup>26</sup> Rr. Ratnaningsih. *Pemakai dan Pembimbing Pengguna Perpustakaan*. (Jakarta : Proyek Pengembangan Staf dan Sarana Perguruan Tinggi, 1994), hal. 4

perhatian yakni<sup>27</sup>:

- a). Unsur pemakai, meliputi pertama, kerangka pengetahuan sejauh mana pemakai jasa perpustakaan mengetahui dan memahami tentang perpustakaan; kedua, kerangka pengalaman dilihat dari bagaimana pengalaman pemakai jasa perpustakaan menggunakan perpustakaan; ketiga, kebutuhan koleksi apa yang diperlukan pemakai jasa perpustakaan.
- b). Unsur perpustakaan meliputi kekelengkapan koleksi, kelengkapan alat bantu penelusuran informasi, kelengkapan gedung perpustakaan.
- c). Unsur lingkungan berkaitan dengan lembaga yang menjadi penanggungjawab perpustakaan yang bersangkutan.

### c. Pelaksanaan Pendidikan Pemakai Jasa Perpustakaan (*User Education*)

Pendidikan pemakai jasa perpustakaan (*user education*) dilakukan melalui kepada 3 macam yakni<sup>28</sup>:

- Orientasi

Adalah kegiatan memperkenalkan kepada pemakai jasa perpustakaan mengenai aspek perpustakaan secara fisik yaitu layanan apa saja yang ditawarkan dan materi apa saja yang disediakan.

- Instruksi Perpustakaan

Pemakai jasa perpustakaan diberikan penjelasan mendalam baik tentang

---

<sup>27</sup> Anwar Syamsudin, *Op.Cit.*, hal. 168

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 170

materi perpustakaan maupun layanan yang diberikan. Biasanya mengajarkan teknik penggunaan bahan rujukan kartu katalog dan sarana bibliografi.

- Instruksi Bibliografi

Mendidik para pemakai jasa perpustakaan secara intensif mengenai bibliografi. Dalam program ini diajarkan cara menelusur literatur dengan orientasi subjek yang lebih khusus, metodologi riset secara menyeluruh, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan pendidikan pemakai jasa perpustakaan menggunakan metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan pendidikan. Untuk melengkapi maka dapat digunakan media pembelajaran berupa film, video, tape, audio visual, slide dan panduan yang tercatat. Pemberian materi harus sesuai dengan tingkat pemakai jasa perpustakaan.

Seperti halnya kegiatan pembelajaran, hasil yang diharapkan dari kegiatan pendidikan pemakai jasa perpustakaan ini meliputi 3 aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam aspek kognitif, pemakai jasa perpustakaan diharapkan memahami dan mengerti cara menggunakan perpustakaan dan fasilitasnya. Ranah afektif diharapkan dapat membuat pemakai jasa perpustakaan tertarik dan senang menggunakan atau memanfaatkan perpustakaan. Sedangkan ranah psikomotorik, pemakai jasa perpustakaan memiliki keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan perpustakaan.

### **C. Dampak UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Perpustakaan Nasional RI**

#### **1. Munculnya UU Nomor 22 Tahun 1999**

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autonomy* yang terdiri dari dua kata yakni *Auto* = sendiri dan *Nomous* = hukum atau peraturan. Dalam *Encyclopedia of social science* kata otonomi memiliki pengertian *the legal self sufficiency of social body and it its actual independence*. Jadi terdapat dua ciri dalam istilah otonomi yakni *self sufficiency* (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri) dan *actual independence* (sepenuhnya merdeka). Menurut UU No. 22 Tahun 1999, istilah otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>.

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di bawah UU 22/1999

---

<sup>29</sup> Agung Budiono,dkk, *Laporan Penelitian Dampak Penerapan Otonomi Daerah (OTDA) Terhadap Perkembangan Perpustakaan Umum (Survey Pada Perpustakaan Umum Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, (Bandung : Lembaga Penelitian UNPAD Fakultas Ilmu Komunikasi, 2004) hal. 9

secara ideal dapat mendorong terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat otonomi daerah menurut UU 22/1999 tersebut akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Hal tersebut mungkin saja dapat diwujudkan karena daerah (Kabupaten dan Kota ) mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

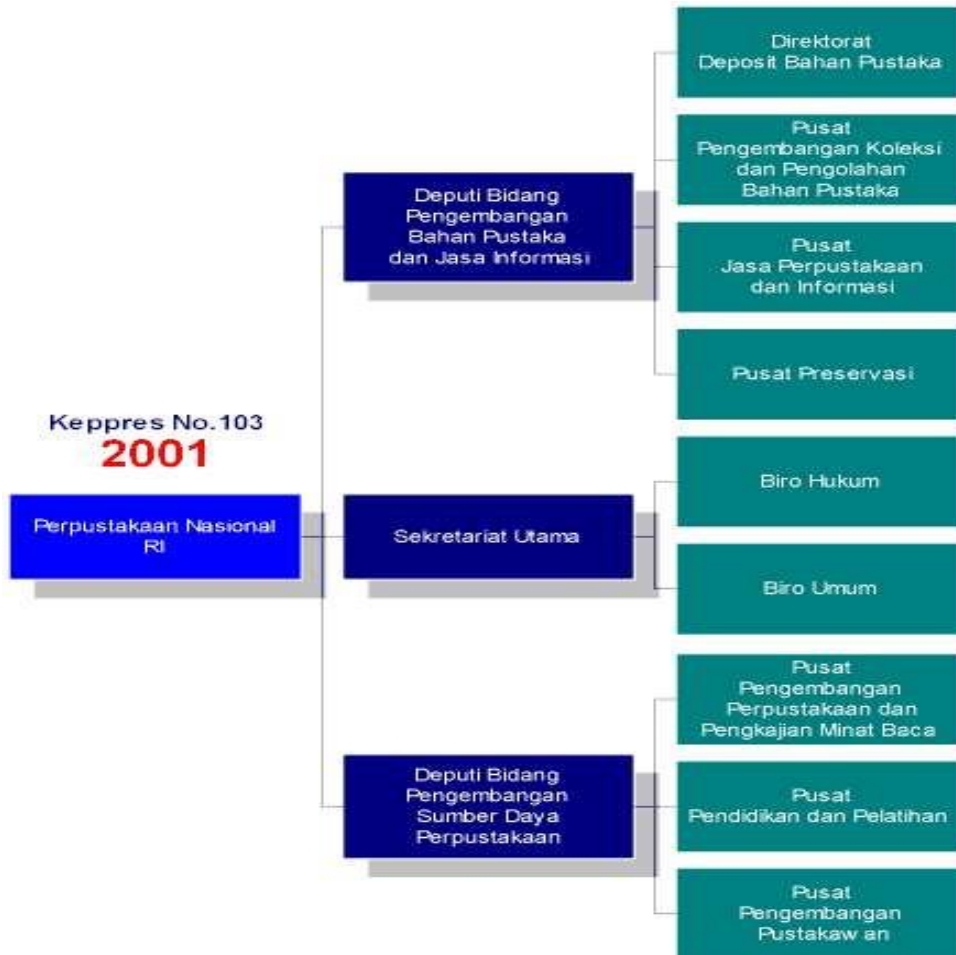
## **2. Dampak Penerapan UU Terhadap Perpustakaan Nasional RI**

Seperti yang telah dikemukakan di atas, maka keberadaan UU No.22 Tahun 1999 ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun, keberadaan Perpustakaan Nasional RI sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang handal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan. Hal ini terjadi karena perbedaan kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta kesadaran dan pemahaman yang berbeda akan pentingnya

peran dan fungsi perpustakaan.

Perpustakaan Nasional tidak bisa memaksakan kebijakan yang ada di daerah karena secara struktural tidak ada koordinasi langsung antara Perpustakaan Nasional RI dengan Perpustakaan Daerah. Sejak pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah terdapat perubahan struktur di Perpustakaan Nasional RI, seperti yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Bagan 4  
Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional Setelah Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2001<sup>30</sup>



<sup>30</sup> [www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) ("Masa Perkembangan Perpustakaan Nasional RI"), diakses pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 16.06 wib.

Saat ini, hal yang bisa dilakukan adalah dengan pembinaan secara terus-menerus mengenai pentingnya keberadaan, peran dan fungsi perpustakaan dalam upaya pelestarian budaya bangsa<sup>31</sup>. Sikap tidak bersahabat ini tidak hanya ditampilkan oleh jajaran pemerintahan daerah sebagai penentu kebijakan namun, juga masyarakat daerah yang merupakan pemilik aset asli daerah. Saat ini, masih banyak naskah-naskah nusantara yang dimiliki oleh perseorangan di daerah dan ada keengganan dari mereka untuk menyerahkan naskah tersebut untuk dikelola dan dilestarikan oleh Perpustakaan Nasional RI. Mereka merasa khawatir warisan nenek moyangnya itu akan rusak atau bahkan hilang. Selain itu, kompensasi atau biaya penggantian yang diberikan oleh pemerintah pusat jumlahnya tidak seberapa bila dibandingkan jika warisan itu dijual kepada pihak asing<sup>32</sup>. Oleh karena itu, banyak warisan budaya Indonesia yang justru berada di luar negeri padahal di dalam negeri kita tidak punya. Itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya bangsa. Untuk itulah Perpustakaan Nasional melakukan upaya pemahaman kepada masyarakat agar mau bekerja sama. Upaya pendekatan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di daerah seperti putra daerah, jajaran aparatur pemerintahan daerah serta sosialisasi langsung secara personal kepada masyarakat.

Hasilnya, semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menyerahkan atau sekedar meminjamkan warisan budaya kepada pihak Perpustakaan Nasional untuk dikelola dan dilestarikan. Tindakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ketika mendapatkan benda warisan masa lalu itu adalah dengan memberikan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Drs. Syamsul Bahri, pada tanggal 6 Januari 2009, di Jakarta.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Drs. Joko Prasetyo, pada tanggal 28 Oktober, di Jakarta.



pemahaman tentang bagaimana upaya penyimpanan benda-benda tersebut. Jika memungkinkan benda itu akan di bawa ke Jakarta untuk kemudian diselamatkan isi yang terkandung di dalamnya. Di Jakarta, upaya pelestarian dilakukan dengan mengalihmediakan dalam bentuk mikrofilm, mikrofis atau dalam bentuk digital seperti CD.